

## Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil

### *Social Empowerment of Isolated Customary Community*

**Teuku Murdani**

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh.  
Telpon: (0651) 7552548, HP +6282165349993. E-mail: teuku.murdani@gmail.com.  
Diterima 14 Desember 2016, diperbaiki 25 Januari 2017, disetujui 6 Maret 2017.

#### *Abstract*

*Komunitas Adat Terpencil (KAT) is a program designed to improve both social life and economic condition for isolated customary communities. The aim of the program as stipulated in Indonesian national development planning is to afford the prosperity to every Indonesian citizen. This article is discussing a preparation phase of social community empowerment aiming to understand social condition and to absorb community aspirations on what they needs in affording social prosperity; Analyze the proper format of social empowerment to targeted community. The observation conducted in Dusun Pantan Kriko, Gampong Pantan Sinaku, Pintu Rime Gayo Sub-District, Bener Meriah District. The result of field study concluded that all local community members are coffee farmers, housing condition is really apprehensive, the houses are not appropriate to live, limited access to the social, health and education services. The primary needs are proper house, religious practice facility, community center building and its supporting facilities to facilitate meetings. Community sociological condition is really enthusiasm and ready to be empowered. Environment condition also very supported to develop various agriculture activities. Bener Meriah local government has declared the commitment to support and contribute to ensure the success of this social community empowerment program*

**Key word:** *isolated community; empowerment; social and economic*

#### **Abstrak**

Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan salah satu program untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terpencil, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Tulisan ini merupakan pemberdayaan sosial komunitas terpencil dengan tujuan untuk, memahami kondisi sosial dan menjangkau aspirasi masyarakat tentang kebutuhan kesejahteraan sosial; Menganalisis bentuk pemberdayaan sosial bagi komunitas setempat. Pengamatan dilakukan di Dusun Pantan Kriko, Gampong Pantan Sinaku, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan studi lapangan masyarakat setempat hidup sebagai petani kebun kopi, kondisi permukiman penduduk sangat memprihatinkan, masih ada rumah tidak layak huni, terbatasnya akses terhadap pelayanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Kebutuhan utama adalah pembangunan rumah layak huni, sarana peribadatan, gedung serbaguna untuk pertemuan dan sarana pendukung lainnya. Kondisi sosiologis masyarakat sangat antusias dan siap untuk diberdayakan, kondisi lingkungan sangat baik untuk mengembangkan berbagai pertanian. Pemerintah daerah Bener Meriah menegaskan komitmennya siap berdampingan dengan program pemberdayaan sosial komunitas setempat.

**Kata kunci:** *komunitas adat terpencil, pemberdayaan, sosial dan ekonomi*

#### **A. Pendahuluan**

Pembangunan (*development*) merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memperbaiki taraf hidup ke arah yang lebih baik. Pembangunan Nasional (Tjokroamidjojo, 1980) adalah pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh dan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup, serta kesejahteraan

seluruh masyarakat yang adil dan merata serta pembangunan dasar yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan, karena tujuan pembangunan nasional untuk menyejahterakan rakyat. Pembangunan (Haslam, dkk: 2012) adalah mengisi gap antara yang kaya dengan yang miskin untuk menciptakan kesetaraan kepada semua orang. Disisi lain pembangunan (Kristensen: 1974) da-

pat dipahami sebagai upaya untuk memperbaiki ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Pembangunan adalah proses perubahan untuk membangun dan mengembangkan diri menjadi lebih mandiri dan lebih baik, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pembangunan dimaksud mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial dengan partisipasi yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk memajukan sosial dan material, termasuk bertambah besarnya kualitas keadilan dan kebebasan (Reet & Hardwick, 1976).

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan, bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan berbagai pendapat, pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan secara terus-menerus untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa maju, baik dalam taraf hidup maupun dalam berbagai bidang aspek kehidupan.

Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia berada dalam persoalan kemiskinan yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh anak bangsa sesuai dengan tujuan dari sila ke lima Pancasila, di antaranya strategi yang sangat menyentuh masyarakat akar rumput adalah program komunitas adat terpencil. Program yang dilakukan Kementerian Sosial dan dinas sosial (provinsi dan kabupaten) ini mampu menjangkau masyarakat pedalaman yang sangat terpencil dan belum sepenuhnya merasakan kesejahteraan berbangsa sebagaimana masyarakat yang hidup di kota-kota. Pemberdayaan komuni-

tas di Provinsi Aceh sudah dilakukan di beberapa daerah telah menunjukkan hasil yang sangat positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2016 pemberdayaan KAT kembali diusulkan di Kabupaten Bener Meriah dengan lokasi di Gampong Pantan Sinaku, Kecamatan Pintu Rime Gayo. Kabupaten pemekaran ini dan beberapa wilayahnya dianggap masih kurang tersentuh dengan berbagai program pemberdayaan. Konflik yang telah mendera Aceh selama 30 tahun telah menyebabkan masyarakat tertinggal dalam berbagai hal, juga yang menyebabkan mereka meninggalkan kawasan hunian bertahun-tahun dan menyebabkan kehilangan rumah, kebun yang terlantar dan terjerat hutang yang menyebabkan mereka sangat membutuhkan bantuan untuk bangkit kembali menjadi anak bangsa yang mandiri. Mereka memiliki sumberdaya alam yang sangat melimpah tetapi tidak memiliki modal dan kemampuan yang cukup untuk mengkonversikan menjadi sumber kemakmuran. Akses jalan dan prasarana yang ada sangat sulit bagi mereka untuk dapat mengakses pasar, baik untuk keperluan perdagangan maupun pangan untuk kehidupan sehari-hari.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini meliputi: bagaimana kondisi sosial ekonomi, sumber daya alam, sosial budaya dan kesejahteraan sosial komunitas setempat; Bagaimana aspirasi masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk mengupayakan kesejahteraan; Bagaimana bentuk dan strategi rencana pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi mereka saat ini. Tujuan penelitian ini meliputi: Memahami kondisi sosial ekonomi, sumber daya alam, sosial budaya dan kesejahteraan sosial masyarakat setempat; Mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat Pantan Sinaku dalam upaya pemberdayaan kesejahteraan sosial; Menyusun strategi dan model pemberdayaan yang sesuai serta tepat sasaran.

## **B. Penggunaan Metode Penelitian**

Pengamatan, penentuan terhadap calon lokasi pemberdayaan Gampong Pantan Sinaku,

Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, ditentukan oleh Dinas Sosial Provinsi Aceh berdasarkan proposal permohonan dari Kabupaten Bener Meriah, juga mengacu kepada data base Kementerian Sosial yang telah menyusun lokasi target KAT diseluruh Indonesia (Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, 2014 dan Kementerian Sosial, 2014c). Alasan utama pemilihan lokasi karena sesuai dengan kriteria lokasi KAT yang telah ditetapkan, peneliti melakukan kunjungan awal selama tiga hari untuk melakukan observasi dan melihat langsung kondisi kehidupan sosial masyarakat penerima program. Untuk mevalidasi data awal, peneliti melakukan kunjungan kedua selama tiga hari untuk melakukan wawancara mendalam dengan masyarakat penerima program KAT.

Peneliti didampingi oleh staf Dinas Sosial Provinsi Aceh dan Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah dalam kunjungan lapangan. Peneliti difasilitasi dalam melakukan observasi dan pertemuan dengan penerima bantuan dan mengatur pertemuan dengan tokoh masyarakat setempat seperti kepala gampong, tokoh adat, kepala dusun dan pemimpin agama untuk diwawancarai. Peneliti juga melakukan pertemuan kelompok dengan masyarakat setempat sebagai upaya untuk memastikan data dan keterangan yang diperoleh telah valid. Temuan data lapangan selama dua kali kunjungan dipresentasikan dan dianalisis secara deskriptif.

### C. Pemberdayaan Komunitas adat Terpencil

#### 1. Komunitas Adat Terpencil di Bener Meriah NAD

Definisi komunitas adat terpencil terbaru tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil. Pelaksanaan kegiatan diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil. Definisi Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat dengan KAT adalah

sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan rentan sosial ekonomi.

Kriteria Komunitas Adat Terpencil meliputi: Keterbatasan akses pelayanan sosial dasar; Tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam; Marjinal di perdesaan dan perkotaan; Tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil. Umumnya keberadaan komunitas terpencil di wilayah yang terisolasi seperti di dataran tinggi atau pegunungan, dataran rendah, daerah rawa, pulau-pulau, dan daerah perbatasan antarnegara. Penetapan kategori berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Tim Terpadu dengan menggunakan instrumen penilaian yang dilakukan sebelum pemberdayaan sosial.

Kementerian Sosial menetapkan tiga kategori: Kategori I, hidup berpencar dan berpindah-pindah (*nomaden*); Kategori II hidup menetap sementara; Kategori III hidup menetap. Sesuai dengan rancangan Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2019 yang menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang dirinci sebagai berikut (Kementerian Sosial, 2014 dan 2015). Pemberdayaan Sosial yang Komprehensif meliputi: Penataan asistensi sosial regular dan temporer berbasis keluarga melalui program keluarga produktif dan sejahtera; Perluasan cakupan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi penduduk rentan dan pekerja informal miskin; Peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusif penyandang disabilitas lanjut usia, serta masyarakat marjinal; Penguatan kelembagaan dan asistensi sosial.

Peningkatan Pelayan Dasar meliputi: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan; Meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan; Penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standarisasi verifikasi, validasi dan sistem pengelolaan

data PMKS. **Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan** meliputi: Peningkatan peran pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan ekonomi lokal bagi masyarakat miskin dan rentan; Peningkatan kualitas pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin.

**Tahapan Pemberdayaan**, pola pemberdayaan sosial terhadap komunitas terdiri atas empat tahap sebagai berikut. Persiapan, tahapan prakondisi pemberdayaan sosial komunitas. Persiapan dilakukan dalam satu tahun anggaran melalui enam kegiatan yaitu, pemetaan sosial, penjajakan awal, studi kelayakan, seminar dan loka karya daerah dan nasional, penyusunan rencana dan program, penyiapan kondisi masyarakat.

Pelaksanaan, pelaksanaan pemberdayaan sosial komunitas disesuaikan dengan kategori komunitas dengan pemberdayaan, pemantapan, dan pengembangan. Pemberdayaan sosial yang dilakukan tergantung dari kategori komunitas. Kategori I selama tiga tahun berturut-turut, Kategori II selama dua tahun, dan Kategori III selama satu tahun. Ada sembilan pokok kegiatan yaitu, diagnosa dan pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, pendampingan, pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha, peningkatan akses pemasaran hasil usaha, supervisi dan advokasi sosial, penguatan keserasian sosial, penataan lingkungan sosial, bimbingan lanjut.

Rujukan, tahapan akhir disebut juga purnabina berupa pengalihan kegiatan pada berbagai instansi atau pihak lain sesuai kebutuhan komunitas. Kegiatan dapat berlangsung satu sampai dua tahun. Diharapkan komunitas sudah menjadi bagian dari warga desa atau pengembangan menjadi desa definitif. Terminasi, tahapan pengalihan program pemberdayaan sosial terhadap komunitas.

**Lokasi Penelitian:** Penelitian ini dilakukan di Gampong Pantan Sinaku, kecamatan Pintu Rime Gayo, kabupaten Bener Meriah. Awalnya Gampong Pantan Sinaku bagian dari Dusun

Perdamaian, Desa Blang Rakal, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah. Tahun 1994 Pantan Sinaku ditetapkan menjadi Dusun Pantan Sinaku. Setelah penduduk semakin bertambah, dijadikan sebagai Desa atau Gampong Pantan Sinaku. Nama gampong berasal dari bahasa Gayo; *pantan* = tumpukan; *sinaku* = punya saya, sehingga diartikan gampong kepunyaan saya. Struktur gampong terdiri atas; Kepala Gampong, Sekretaris Gampong, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, dan dibantu Kepala Dusun Pantan Sinaka, Kepala Dusun Pantan Pirak, Kepala Dusun Pantan Kriko, dan Kepala Dusun Lembah Trang. Kepala gampong didampingi seorang Ketua Badan Pemberdayaan Gampong (Subur, 2015: 1).

Gampong Pantan Sinaku merupakan salah satu gampong paling ujung dalam Kecamatan Pintu Rime Gayo. Gampong ini berjarak 14 km dari pusat kecamatan. Luas wilayah desa Pantan Sinaku  $\pm$  5000 Ha, terbagi ke dalam empat dusun yakni Pantan Sinaku, Pantan Pirak, Pantan Kriko, dan Lembah Trang. Jumlah penduduk desa Pantan Sinaku 520 jiwa dengan profesi semuanya petani kebun. Gampong Pantan Sinaku secara administratif memiliki batas wilayah sebelah utara langsung berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara; sebelah timur berbatasan dengan Gampong Owak, Kecamatan Permata, sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Perdamaian, dan sebelah barat berbatasan dengan Gampong Gelogoh. Berdasarkan keterangan dari warga dan perangkat desa, belum pernah dijumpai tingkat kerawanan penyakit yang mengkhawatirkan serta penyakit menular, tidak ada puskesmas di desa Pantan Sinaku, tetapi mereka memiliki Bides yang menetap di desa.

Akses ke ibu kota kecamatan hanya bisa dilalui dengan jalan darat. Kondisi jalan hanya jalan tanah yang diratakan melalui program PNPM pada tahun 2012. Ketika musim penghujan kondisi jalan sangat sukar untuk dilalui karena berlumpur. Jarak ke ibukota kecamatan  $\pm$  14 km, tidak ada kendaraan umum untuk mengakses

ibukota kecamatan, sehingga mereka sangat jarang keluar dari lokasi, kecuali yang memiliki kendaraan roda dua. Gampong Pantan Sinaku belum ada sarana perekonomian seperti pasar, sehingga apabila ingin memperoleh kebutuhan sehari-hari mereka harus berpergian ke ibukota kecamatan.

Kondisi alam Gampong Pantan Sinaku sangat baik untuk pertanian dengan berbagai jenis tanaman hortikultura; sayur-sayuran, kacang-kacangan, cabe yang menjadi target lokasi pembinaan program Komunitas Adat Terpencil di gampong Pantan Sinaku adalah dusun Pantan Kriko. Dusun ini berlokasi di penghujung wilayah Bener Meriah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Utara. Luas wilayah dusun Pantan Kriko ± 2000 Ha, penduduknya hidup berpencar-pencar. Walaupun kondisi alam sangat subur tetapi penduduknya tergolong miskin dan masih jauh dari teknologi modern. Dusun ini memiliki persoalan sosial yang cukup komplis serta persoalan ekonomi yang cukup mengkhawatirkan, sehingga sangat memenuhi kriteria untuk memperoleh program KAT.

**Kependudukan:** Jumlah penduduk di dusun Pantan Kriko yang menjadi lokasi KAT adalah 41 Kepala Keluarga dengan jumlah 165 jiwa, lebih dari setengah atau 93 laki-laki (56,36 persen) dan 72 perempuan (43,64 persen). Semua kepala keluarga berstatus sebagai petani kebun dan semua anggota keluarga ikut terlibat dalam bekerja di kebun untuk menghidupi keluarga. Pola kehidupan masyarakat dusun Pantan Kriko berpencar, sebagian dari mereka masih memiliki rumah walaupun tidak layak huni tetapi menetap di lokasi, sebagian yang rumahnya rusak atau hancur ketika konflik mendera Aceh, menetap atau menumpang di rumah sanak famili di dusun lain. Kondisi rumah konstruksi kayu tanpa diproses yang hanya dibelah dengan menggunakan mesin *chainsaw*, kebanyakan rumah beratap seng. Sumber air dilokasi pemukiman berasal dari aliran sungai dan mereka harus mengangkut dengan berjalan kaki rata-rata sejauh satu km atau dengan menampung air hujan. Semua rumah

yang dikunjungi tidak tersedia jamban keluarga dan umumnya penduduk melakukan buang air besar di hutan atau bagian lembah yang tersedia air mengalir.

Seluruh penduduk dusun Pantan Kriko berprofesi sebagai petani kebun, terutama kopi. Ketika mereka memiliki waktu luang dan sambil menunggu panen kopi mereka umumnya menanam cabe. Umumnya mereka menggarap lahan sendiri yang diperoleh dari warisan orang tua, tetapi ada juga yang menggarap kebun orang lain dengan perjanjian bagi hasil. Pola pengolahan lahan masih dilakukan secara tradisional, menurut pengakuan dari beberapa penduduk tidak ada penyuluhan dari instansi terkait mengenai tatacara perkebunan yang baik dan benar serta metode menggunakan teknologi modern dalam mengolah hasil pertanian. Mereka menggunakan cangkul, parang, dan gilingan kopi yang terbuat dari kayu. Kegiatan lain seperti peternakan hanya sebatas memelihara ayam kampung, untuk konsumsi keluarga dan tidak diperjual belikan.

Ketika darurat militer diberlakukan di Aceh pada tahun 2001, semua masyarakat direlokasikan dan masyarakat terpencil terpaksa mengungsi ke desa lain dan tinggal menumpang bersama sanak saudara, tetapi ketika mereka kembali ke lokasi setelah penandatanganan perjanjian damai 2005 kebanyakan rumah mereka telah rusak dan tidak dapat huni kembali. Akibat dari dampak konflik umumnya mereka terjatuh hutang selama empat tahun mengungsi karena tidak bisa mengelola kebun, sehingga hasil perkebunan kopi umumnya mereka habiskan untuk membayar hutang, sebahagian kecil mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Secara umum didusun Pantan Sinaku baru ada dua gedung layanan publik yakni Polindes dan gedung sekolah sebanyak tiga kelas. Di dusun Pantan Kriko sama sekali belum tersedia gedung layanan publik. Sebenarnya mereka memiliki satu bangunan balai (*meunasah*), tetapi tidak bisa digunakan lagi setelah ditinggalkan selama empat tahun.

Akses ke lokasi penerima program KAT hanya dengan jalur darat dengan kondisi jalan tanah. Moda transportasi umumnya roda dua, tidak ada bus umum atau kendaraan roda empat jenis lain yang datang ke lokasi. Pusat pelayanan kesehatan berada di dusun lain yakni polindes dengan jarak tempuh dua kilometer dari lokasi dengan mengendarai kendaraan bermotor roda dua atau berjalan kaki. Umumnya kalau diserang penyakit ringan, mereka memilih berobat secara tradisional atau meminta obat sama bidan desa.

Prasarana sekolah hanya tersedia sampai kelas tiga dengan jarak tempuh 1,5 km dari lokasi. Anak-anak usia sekolah dasar umumnya diantar ke sekolah dengan sepeda motor pagi hari dan mereka harus berjalan kaki pulang dari sekolah karena orang tua mereka sudah ke kebun. Jika ingin melanjutkan kelas empat, mereka harus menempuh jarak sejauh tujuh kilometer, juga yang sekolah di SMP. Kondisi ini menyebabkan kebanyakan dari masyarakat dusun Pantan Kriko tidak menamatkan sekolah dasar. Lokasi penerima Program KAT tidak tersedia aliran listrik, arus listrik terakhir dari lokasi berjarak 1,5 km., kondisi ini menyebabkan kesulitan bagi anak-anak untuk belajar malam hari yang hanya menggunakan lampu teplok.

Sosial Budaya: Menurut cerita dari warga, gampong Pantan Sinaku ini sudah cukup lama dibangun oleh kakek mereka. Pada mulanya desa ini merupakan kawasan perkebunan, warganya tidak menetap, tetapi lama-kelamaan mereka memutuskan untuk menetap dengan dua alasan, yakni akses jalan yang sangat sulit apabila musim hujan dan sangat sulit untuk mengurus keluarga jika anak-anak ditinggal di rumah yang sangat jauh dari kebun. Akan tetapi kondisi gampong Pantan Kriko telah mengalami beberapa kali pasang surut mengingat kondisi yang sangat jauh dengan pasar dan pernah didera oleh konflik yang berkepanjangan. Kondisi ini mengakibatkan mereka tetap mengalami kesulitan secara ekonomi walaupun sumber daya alam melimpah.

Kondisi yang sangat memprihatinkan adalah ketika mereka harus meninggalkan gampong untuk mengungsi pada saat darurat militer diterapkan di Aceh dan mereka baru bisa kembali empat tahun kemudian, tidak mudah bagi masyarakat gampong untuk bangkit kembali setelah empat tahun terpuruk. Penduduk di gampong Pantan Sinaku terdiri dari tiga suku, yakni Aceh, Gayo dan Jawa. Mereka sudah lama menetap di gampong Pantan Sinaku sehingga agak sulit untuk membedakan asal mereka. Semua penduduk beragama Islam, mereka memeluk Islam sudah turun temurun dan tidak ditemui adanya *mualaf* di desa tersebut. Adat istiadat di gampong Pantan Sinaku semuanya bernuansa Islam sebagai kepercayaan yang mereka anut (Ahmadi, 2012).

Bahasa yang mereka gunakan sehari-hari sangat bervariasi antara bahasa Aceh, Gayo dan Jawa. Namun mayoritas mereka adalah Gayo sehingga bahasa Gayo akan sangat mudah kita dengar ketika mereka berkomunikasi. Di sekolah dan dalam pertemuan mereka menggunakan bahasa Indonesia. Ketika darurat militer di Aceh diterapkan, semua penduduk gampong Pantan Sinaku melakukan eksodus keluar gampong. Mereka rata-rata menumpang di rumah sanak famili atau menyewa rumah ala kadarnya untuk melanjutkan kehidupan. Setelah penanda tanganan perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, mereka kembali lagi ke gampong, tetapi rumah-rumah warga di dusun Pantan Kriko dan Lembah Trang mengalami rusak berat dan tidak mungkin ditempati lagi. Hanya beberapa rumah yang layak huni. Kondisi sosial masyarakat menjadi hancur, lahan perkebunan hampir menjadi hutan, pendapatan keluarga menjadi porak poranda dan mereka harus memulai kembali dari awal.

Gampong Pantan Sinaku telah memiliki perangkat desa dengan baik, tetapi berpencar-pencar karena masih ada yang tinggal di tempat sanak famili disebabkan mereka belum punya rumah di gampong. Akan tetapi apabila diperlukan, mereka sangat mudah untuk dikumpulkan. Semua persoalan dan rencana gampong mereka

selesaikan secara musyawarah dan sesuai dengan adat yang berlaku.

**Aspirasi:** Masyarakat Dusun Pantan Kriko sangat membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, seperti jalan agar bisa dilalui, baik ketika musim kemarau maupun musim hujan. Sarana pendidikan, setidaknya sekolah dasar sampai kelas enam sehingga anak-anak mereka mampu menamatkan sekolah dasar. Mereka juga sangat membutuhkan sarana pelayanan kesehatan yang memadai untuk mengobati penyakit-penyakit ringan. Mereka juga sangat membutuhkan rumah layak huni bagi kehidupan keluarga dan tempat tumbuh kembang anak-anak. Untuk keperluan sosial kemasyarakatan, mereka sangat membutuhkan rumah ibadah yang nyaman dan bangunan serba guna untuk berbagai keperluan kegiatan kemasyarakatan.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi, mereka sangat membutuhkan baik modal dan berbagai jenis bibit tanaman maupun penguatan kapasitas. Mereka sementara hanya menanam kopi dan cabe dengan menggunakan pengetahuan yang diwariskan oleh orang tua. Mereka sangat mengharapkan adanya penguatan kapasitas semacam penyuluhan atau pelatihan menanam dan merawat kebun kopi yang baik dan benar, sehingga mampu meningkatkan jumlah produksi. Mereka juga membutuhkan pengetahuan menanam berbagai jenis palawija agar tidak hanya bergantung pada kebun kopi yang masa panennya hanya sekali dalam setahun. Mereka juga membutuhkan bantuan bibit tanaman yang sesuai ditanam di daerah mereka menetap.

**Strategi Pemberdayaan:** Berdasarkan hasil temuan lapangan dapat disimpulkan ke dalam beberapa bagian, yakni peluang, potensi dan aspirasi komunitas setempat. Dengan memahami masalah tersebut dapat diciptakan sebuah model dan kebijakan pemberdayaan terhadap masyarakat setempat sebagai berikut. Potensi: setelah dianalisis dari temuan di lapangan, potensi dan peluang untuk pemberdayaan KAT di Dusun Pantan Kriko, Kampung Pantan Sinaku,

Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah dapat dilakukan sebagai berikut.

Hampir semua masyarakat dalam kondisi usia produktif sehingga sangat cocok untuk diberdayakan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka sendiri. Sumber air untuk kebutuhan penduduk cukup tersedia baik sungai maupun mata air, namun dibutuhkan pembangunan sistem pengairan untuk mendukung kehidupan keluarga. Rasio lahan cukup luas bila dibandingkan dengan jumlah penduduk. Lahan yang tersedia sangat cocok untuk pertanian, palawija dan berbagai jenis hortikultura. Lahan berbukit namun cukup produktif dan sangat subur. Badan jalan menuju kampung sudah ada. Kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan dan hal-hal baru cukup tinggi. Semangat dan kesiapan masyarakat untuk menerima peningkatan kapasitas cukup tinggi. Organisasi gampong sudah ada dan dapat difungsikan untuk menunjang program. Solidaritas sudah terbina dan keinginan untuk menolong antar sesama cukup tinggi.

**Kendala:** Dalam upaya pemberdayaan KAT di dusun Pantan Pirak, gampong Pantan Sinaku, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah teridentifikasi beberapa kemungkinan kendala di antaranya: Jalan sebagai sarana transportasi hanya lancar dilalui ketika musim kemarau, sehingga hubungan antara dusun Pantan kriko dengan ibukota kecamatan sedikit terganggu. Pengetahuan warga tentang teknologi masih sangat minim. Listrik belum terhubung ke lokasi. Semua warga dusun Pantan Kriko membutuhkan rumah layak huni. Pola hidup masyarakat belum memahami higienis dan standar kesehatan

**Aspirasi dan Kebutuhan:** Berdasarkan hasil pengamatan langsung dan wawancara dengan warga calon penerima program KAT dusun Pantan Kriko, gampong Pantan Sinaku, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah maka dapat disimpulkan aspirasi masyarakat sebagai berikut. Pembangunan rumah yang layak huni. Modal usaha untuk mulai menanam

jenis tanaman hortikultura. Bantuan berbagai sarana penunjang seperti pupuk, obat-obatan dan benih tanaman. Bimbingan dan pelatihan tentang bagaimana cara bercocok tanam terhadap sayur, palawija dan jenis hortikultura. Bimbingan tentang bagaimana menjaga lingkungan hidup, hidup sehat dan penyuluhan agama.

**Pembinaan Mikro:** Pertimbangan pembinaan yang perlu dilakukan meliputi: Pembangunan rumah layak huni terhadap 41 KK. Pembangunan sarana peribadatan dan balai serba guna. Penyediaan dana stimulus bagi warga untuk memulai menanam tanaman selain kopi. Penyediaan peralatan kerja, bibit, pupuk dan obat-obatan untuk pertanian. Melakukan pendampingan untuk memastikan keberhasilan program. Melakukan penyuluhan tentang pola pertanian yang benar, bagaimana menggunakan teknologi, pengolahan hasil panen dan pemasaran. Menambah gedung sekolah sampai kelas enam. Mengorganisir kelompok tani untuk memudahkan didalam pembinaan. **Pembinaan Makro:** secara makro pemberdayaan yang dilakukan dapat meliputi: Meningkatkan kualitas jalan agar dapat dilalui oleh roda empat dalam segala cuaca. Membangun hubungan kemitraan antara para petani dengan pedagang untuk memudahkan pemasaran hasil panen.

#### D. Penutup

**Kesimpulan:** Berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh tentang situasi dan kondisi Kampung Pantan Sinaku, khususnya Dusun Pantan Kriko pembangunan fisik mulai dilakukan pengerasan jalan tanah. Artinya sudah ada potensi untuk dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat dan roda dua yang memungkinkan komunitas setempat berpotensi untuk berkembang. Masyarakat sudah sangat siap secara psikologis dan sosiologis untuk berpartisipasi di dalam program pemberdayaan. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah beserta beberapa dinas terkait menyatakan kesiapan untuk mendukung program sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Program KAT ini perlu diupayakan

untuk memberdayakan masyarakat yang secara potensi sumber daya alam cukup besar sehingga mampu dikonversikan untuk kesejahteraan anak bangsa.

**Saran:** Perlu diberikan pemahaman kepada calon penerima program KAT sedini mungkin agar mereka memahami betul bagaimana aturan dan kebijakannya dari program. Perlu dibentuk tim terpadu dari pemerintah kabupaten agar semua pihak terlibat didalam program pemberdayaan. Masyarakat atau perwakilan perlu dilibatkan dalam setiap kegiatan sebagai salah satu upaya peningkatan kapasitas bagi mereka.

#### Pustaka Acuan

- Jayaputra, Achmadi. (2012). *Keragaman Suku Bangsa dan Pranata Sosial Masyarakat Indonesia*. Ciputat; UMJ Press.
- ..... dkk (editor). (2014). *Meretas Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil*. Jakarta; Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- Haslam, P, A., Schafer, J., dan Beaudet, P. (2012). *Introduction to International Development, Approach, Actors, and Issues*. Ottawa: Oxford University Press.
- Kementrian Sosial RI. (2014a). *Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015 – 2019*. Jakarta; Kementerian Sosial RI
- ..... (2014b). *Pedoman Persiapan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*. Jakarta; Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- ..... (2014c). *Data Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 2015 - 2019*. Jakarta; Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- ..... (2014d). *Keberhasilan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*. Jakarta; Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- ..... (2015). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*. Jakarta; Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- Kristensen, T.(1974). *Development in Rich and Poor Countries, A General Theory with Statistical Analysis*. New York; Praeger Publishes Inc.
- Peet, R and Hartwick, E., (ND), *Theories of Development, Contention, arguments, Alternative*, Second Edition, the Guiltsford Press, London
- Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. (2014). *Proposal Program Komunitas Adat Terpencil Desa Pantan Sinaku, Kecamatan Pintu Rime Gayo*. Redelong; Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
- Subur,( 2015). *Profil Kampung Pantan Sinaku*. Rongaronga: Kecamatan Pintu Rime Gayo.

- Tjokroamidjojo. (1989). *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta; Republik Indonesia.
- ..... (2009). *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*. Jakarta; Kementerian Sosial RI.
- ..... (2012). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta; Republik Indonesia.
- ..... (2014). *Peraturan Presiden RI Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil*. Jakarta; Kementerian Sosial RI.
- ..... (2015). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil*. Jakarta; Kementerian Sosial RI.

